

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG DEMOKRATISASI PENDIDIKAN

Noor Rohman

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara
e-mail : rochman.fauzan@gmail.com

ABSTRAK

Sebagaimana diyakini oleh umat Islam, bahwa Islam adalah agama yang sarat dengan ajaran yang bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kelangsungannya, sebagai bagian dari rahmatan lil-'alamien. Di antara yang terpenting adalah komitmen Islam terhadap pelaksanaan pendidikan. Berkaitan dengan upaya peningkatan aspek pendidikan, secara rasional, tidak seorangpun di dunia ini yang tidak menyetujui, mulai lapisan masyarakat kelas bawah hingga ke lapisan yang paling tinggi, yakni para pemegang pemerintahan.

Perhatian Islam secara serius terhadap aspek pendidikan dapat diketahui secara pasti dalam lembaran-lembaran perjalanan sejarahnya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran dari sejak munculnya Islam di Madinah di masa Nabi Muhammad SAW. Tradisi keilmuan ini berlanjut secara estafet mulai dari generasi Nabi-Sahabat, Tabi'ien, Tabi'it-Tabi'ien dan seterusnya. Di antara yang paling menonjol dan dicatat oleh tinta emas para sejarawan adalah kegiatan keilmuan (pendidikan) di zaman Kekhalifahan Abbasiyah di Timur (Baghdad) dan Kekhalifahan Islam di Barat (Spanyol). Pada masa-masa ini lahirlah banyak ilmuwan, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan lain-lainnya.

Mengapa gerakan keilmuan (pendidikan) pada masa itu dapat berlangsung sedemikian hebat? Tentu banyak jawaban yang dapat dikemukakan. Di antaranya ialah karena adanya perintah mencari ilmu atas setiap muslim, baik yang tersirat maupun yang tersurat, yang termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini, secara sadar yang didasari dengan keimanan yang kuat, telah diterjemahkan oleh para penguasa pemerintahan Islam dengan menyuruh setiap warga negaranya, **tanpa diskriminasi**, untuk belajar dan mereka (para penguasa) dengan penuh komitmen menyediakan berbagai kemudahan untuk para pembelajar.

Kata kunci : Islam, Demokratisasi, Pendidikan

56 | Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014

ABSTRACT

As believed by Muslims, that Islam is a religion that is loaded with valuable teachings and beneficial to human life and its sustainability, as part of rahmatan lil-'alamien. Among the most important teachings is the Islamic commitment to the implementation of education. In connection with efforts to improve the educational aspect, rationally, no one in this world who does not approve, starting from the lower class to the high stratum, namely the rulers of government.

The very serious concern of Islam to the educational aspect can be known with certainty in the pages of its history. It can be seen from the presence of the teaching activities since the advent of Islam in Medina at the time of

Prophet Muhammad SAW. The scientific tradition then continued in estafette from the generation of Prophet-Companions, Tabi'ien (the followers), Tabi'it-Tabi'ien (the followers of the followers) and so on. Among the most prominent and recorded by historians in gold ink is the scientific activities (education) at the time of the Abbasid Caliphate in the East (Baghdad) and the Islamic Caliphate in the West (Spain). In this period many scientists emerged, such as Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroes) and others.

Why movement of science (education) at that time could take place so great? Certainly there are a lot of answers that can be proposed. Among them is because of the religious command on every Muslim to seek knowledge, either expressed or implied, as contained in the Holy Book (Al-Qur'an) and Hadith. It is, consciously based with strong faith, has been translated by the rulers of the Islamic governments by asking every citizen, without discrimination, to team, and they (the authorities) with a full commitment to provide various facilities for learners.

Keyword: Islam, Democratization, Education

PENDAHULUAN

Tulisan ini sengaja kami kemukakan karena kami berasumsi bahwa masih banyak di antara kita yang meragukan atas kohesivitas hubungan antara Islam dengan pendidikan, baik secara konseptual maupun operasional (implementasi). Keraguan di antara kita terhadap hal tersebut, sementara ini cukup beralasan, karena memang saat ini kita menyaksikan bahwa keberadaan mayoritas umat Islam dalam kondisi lemah; miskin (ekonomi), bodoh (intelektual) dan terpuruk atau tertinggal (sosial). Berkaitan dengan itu dari segi institusional kependidikan tidak banyak ditemukan sekolah-sekolah swasta Islam yang bermutu. Dengan adanya kondisi seperti ini timbul pertanyaan-pertanyaan yang antara lain adalah : "Mengapa kebanyakan umat Islam berada dalam kondisi lemah?", "Sejauh mana Islam memperhatikan terhadap pendidikan umat?", dan "Bagaimana caranya merubah kondisi mereka yang lemah itu sehingga mereka dapat menikmati kehidupan ini secara layak?"

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, secara teoritis diperlukan banyak kajian konseptual dan secara operasional diperlukan kerja-kerja keras, serius dan sistematis dalam upaya-upaya pelaksanaan pendidikan di lapangan. Semuanya itu merupakan tugas-tugas yang tidak ringan. Mengapa? Karena untuk melahirkan solusi-solusi responsif yang *mujarrab* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan usaha-usaha pengkajian yang komprehensif terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan dan juga berbagai tantangannya. Salah satu konsep yang patut diapresiasi kemunculannya adalah konsep "demokratisasi pendidikan". Berkenaan dengan itu, maka tulisan pendek ini mencoba untuk membahasnya.

Untuk tertibnya pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisannya sebagai berikut: Pendahuluan, I. Makna Demokratisasi Pendidikan, II. Islam dan Pendidikan, III. Perspektif Islam tentang Demokratisasi Pendidikan, dan kemudian dipungkasi dengan IV. Penutup

DEMOKRATISASI PENDIDIKAN

Kata demokratisasi berakar dari kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai proses daripada demokrasi atau pendemokrasian. Kata demokrasi, dalam bahasa Inggris *democracy*, adalah salah satu kata terpenting dalam kamus politik. Kata ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu *demos* berarti *people* (rakyat)

> | Noor Rohman Fauzan | Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan

58 | Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014

dan *krateein* berarti *to rule* (menguasailmemerintah),¹ dan ia sudah dikenalkan oleh pemikir-pemikir Yunani kuno sejak empat abad sebelum masehi, namun istilah kata ini baru dikenal kembali pada abad ke 18 yaitu pada saat tercetusnya revolusi Perancis dan kemerdekaan Amerika Serikat.² Demokrasi antara lain difahami sebagai : "*Government in which political control is shared by all the people, either directly or by representatives whom they elect,*" dan "*Political, legal, or social equality*".³ Hampir semaksud dengan pengertian ini adalah pengertian yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Soedijarto, yaitu sebagai berikut :

"Demokrasi adalah suatu konsep politik yang mengandung pengertian tentang suatu sistem politik yang menganut pemahaman penyelenggaraan pemerintahan negara yang pemerintahannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan didasarkan atas persetujuan yang diperintah".⁴

Dari uraian-uraian tentang pengertian demokrasi tersebut, dapatlah diambil suatu pengertian dasar bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterlibatan rakyat merupakan kata kunci, karenanya hak-hak asasi setiap warga masyarakat, yang meliputi *life* (kehidupan), *liberty* (kebebasan) dan *property* (kepemilikan) harus mendapatkan jaminan secara adil, sehingga terwujudlah 'persamaan' (*al-musawah*) bagi setiap warga baik secara politik, hukum maupun sosial.⁵ Jadi, adil dan persamaan adalah pilar-pilar utama, di samping kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan semacamnya dalam bangunan demokrasi.

Selanjutnya, setelah difahaminya makna demokrasi di atas , maka demokrasi dan demokratisasi atau usaha pendemokratisasian adalah suatu ide dan usaha yang sangat baik dan terpuji, terlebih lagi bila dikaitkan dengan pendidikan. Hal ini difahami mengingat bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam membangun kehidupan.⁶ Melalui proses pendidikan seseorang, sekelompok orang atau satu bangsa dapat meningkatkan kualitas-dirinya, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik.⁷ Berkaitan dengan ini pula, secara lebih *praxis* dan implisit John Dewey menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of

associated living, of conjoint communicated experience. The extension in space of the number of individuals who participate in an interest so that each has to refer his own action to that of others, and to consider the action of others to give point and direction to his own, is equivalent to the breaking down of those barriers of class, race and national territory which kept men from perceiving the full import of their activity.^{jj}

Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh, masalah demokratisasi pendidikan mempunyai landasan konstitusional, di mana disebutkan pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan".⁹ Dengan demikian berarti pemerintah berkewajiban memperlakukan setiap warga negara secara adil dalam menggunakan haknya untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu idealnya pemerintah harus mampu menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang *mumpuni*, sehingga setiap warga negara dapat menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak sesuai ketentuan wajib belajar yang diberlakukan. Namun, kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Hal ini terbukti antara lain, dengan masih banyaknya anak umur sekolah yang tak dapat bersekolah karena banyaknya pungutan uang di luar ketentuan. Inilah kelemahan pemerintah kita yang ternyata belum berhasil dalam pelaksanaan demokratisasi pendidikan. Jadi demokratisasi pendidikan di Indonesia masih berada pada tataran konsep, belum sampai pada tingkat pelaksanaan empiris yang bermakna sebagaimana yang sementara ini telah dipraktekkan oleh berbagai negara, seperti negara-negara Eropa dan bahkan sebagian besar negara-negara Arab, Timur-Tengah, di mana penulis pernah mengalami sendiri belajar di Saudi Arabia selama lima tahun, serta Asia seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam – dimana penulis sempat berkhidmat sebagai pensyarah (dosen) di Maktab (College) Perguruan Ugama Seri Begawan selama lebih kurang sepuluh tahun, Taiwan, Korea Selatan dan China.

Jadi, inti dari pada demokratisasi pendidikan adalah pemberian kesempatan yang terbuka bagi setiap individu (warga negara) untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan konstitusional tanpa adanya bentuk diskriminasi apapun (ekonomi, sosio-budaya, politik, agama, etnis dan ras).

ISLAM DAN PENDIDIKAN

Setiap muslim meyakini bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. itu adalah agama yang sempurna. Al-Qur'an sebagai sumber utamanya diyakini sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan pedoman yang lengkap. Oleh karenanya, Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk yang membimbing manusia ke arah jalan hidup yang paling lurus.¹⁰ Selain Al-Qur'an

adalah Hadits/Sunnah Nabi yang dijadikan sebagai sumber utama yang kedua.

makna atau maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau global, seperti menerangkan masalah tata cara shalat, puasa dan haji, dan juga masalah bermuamalah (berinteraksi) dalam kehidupan sehingga setiap individu mampu berperan secara aktif, positif dan akurat.

Dari paparan uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai petunjuk bagi umat manusia memuat nilai-nilai luhur yang mendorong manusia agar selalu meningkatkan kualitas-dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan (belajar/mencari ilmu), sehingga menjadi orang-orang yang selalu dalam petunjuk Allah (*al-muhtadin*). Oleh karena itu, sejak awal kenabian, Nabi Muhammad SAW. sudah melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran-pengajaran (pendidikan).¹¹

Tradisi Nabi ini berlanjut secara estafet sehingga dalam rentangan sejarah Islam – dari sejak awal hingga saat ini – selalu dapat dijumpai keberlangsungan apa yang disebut dengan aktivitas-aktivitas pendidikan, dari kadar yang sederhana hingga yang *massive* sifatnya.

Secara kronologik dapat dikemukakan, bahwa Nabi pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk belajar membaca dan menulis di bawah bimbingan para tawanan perang (non-Muslim), yaitu dibebaskannya setiap tawanan setelah ia mengajar sepuluh orang muslim membaca dan menulis.¹² Dalam periode-periode berikutnya tradisi belajar-mengajar ini menurun ke-generasi-generasi berikutnya, yaitu para sahabat Nabi dan pengikut-pengikutnya (*tabi'in*). Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Jabir, sahabat Nabi, pernah melacak kesahihan sebuah hadits dengan melakukan perjalanan panjang ke Negeri Syam {Sekarang Syria/Suriah} dalam tempo dua bulan.¹³ Pada abad pertengahan, yang dikenal dengan *the Golden Ages*, sementara Eropa sedang mengalami kegelapan (*the Dark Ages*), Baghdad dan Kuffah menjadi pusat peradaban di mana di kedua kota tersebut para ilmuwan berkumpul tanpa adanya diskriminasi. Mereka terdiri dari orang-orang Arab dan Non-Arab, dari orang-orang Islam, Kristen, Yahudi dan Majusi.¹⁴ Sementara itu Khalifah Harun al-Rasyid menerima pajak kepala dengan ukuran buku, dan al-Ma'mun, putranya, membayar penerjemah dengan emas seberat bukunya. Kemudian di belahan barat bumi Islam, yaitu Spanyol {Andalusia}, kegiatan pendidikan pun berlangsung dengan semaraknya. Di bawah pemerintahan al-Hakam (961-976), dibangunlah 27 sekolah di Ibu Kota Negara dan dibangun juga Universitas Cordova, sebagai Universitas tertua di dunia,¹⁵ dengan perpustakaanya

yang begitu megah yang memiliki 400 ribu naskah, dan judul-judulnya dihimpun dalam katalog-katalog yang berjumlah 44 jilid.¹⁶ Dari tingginya intensitas kegiatan pendidikan tersebut, maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan dan pemikir-pemikir Muslim yang unggul dan berpengaruh, seperti Ibnu Sina (Avicenna) (980-1037 M.), seorang filosof dan pakar kedokteran, Alhazen, nama sebenarnya Ali al-Hasan ibn Haytham (960-1039 M.), pakar bidang matematika dan optik, Ar-Razi (Rhazes) (865-925 M.) pakar kedokteran, al-Battani (albatagnius) (929 M.) dan al-Batruji (1085 M.), pakar dalam bidang astronomi, Ibn Rusyd (Averroes) (1126-1198 M.), seorang filosof dan pakar kedokteran, dan masih banyak lagi.¹⁷ Dari mereka itulah bangsa Eropa (Barat) menimba ilmu pengetahuan. Demikian ini secara jujur diakui oleh Bertrand Russel dalam pernyataannya, yaitu sebagai berikut:

*"It was this contact (contact with Muhammadans in Spain and in Sicily), than began the revival of learning in the eleventh century, leading to Schoolastic philosophy. It was later, from the thirteenth century onward, that the study of Greek enabled men to direct to the works of Plato and Aristotle and other Greek writers of antiquity. But if the Arabs had not preserved the tradition, the men of Renaissance might not have suspected how much was to be gained by the revival of classical learning."*¹⁸

Dari kenyataan-kenyataan yang teruraikan di atas, maka jelaslah bagi kita, bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk selalu belajar, mencari ilmu pengetahuan, menguasainya dan kemudian berusaha untuk mengembangkannya. Semuanya itu semata-mata sebagai pengejawantahan seorang hamba dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwasannya Islam itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan praktek-praktek pendidikan. Adapun masalah rendahnya kualitas pendidikan kebanyakan umat Islam sekarang ini adalah disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor-faktor internal umat maupun eksternal. Untuk membahas masalah ini perlu dilakukan suatu pengkajian tersendiri yang khusus untuk itu.

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG DEMOKRATISASI PENDIDIKAN

Setelah dipaparkannya 'makna demokratisasi pendidikan,' dan 'Islam dan Pendidikan', maka dalam bab ini akan dibahas masalah yang berkaitan dengan perspektif Islam tentang demokratisasi pendidikan.

Sehubungan dengan topik ini, penulis akan membahasnya dengan menggunakan dua pandangan, yaitu pandangan teologis dan historis.

Berdasarkan pandangan teologis, demokratisasi pendidikan bukanlah sekedar anjuran, akan tetapi ia merupakan sesuatu yang bersifat imperatif, perintah. Mengapa demikian? Karena demokratisasi pendidikan itu menyangkut masalah pembangunan manusia, sementara Al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi segenap

manusia,¹⁹ yang berarti juga membangun manusia. Secara teologis Al-Qur'an mengatakan, bahwa: "Tidaklah Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia **kecuali untuk mengabdikan (beribadah)** kepada-Ku."²⁰ Dari ayat ini difahami bahwa manusia dituntut oleh Allah bahwa untuk beribadah kepada-Nya, **bukan** kepada yang selain-Nya. Artinya, manusia diwajibkan untuk mengupayakan semua potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan hidup secara luas **semata-mata karena Allah**. Agar amal ibadahnya mempunyai nilai (kualitas) yang tinggi, sebagaimana yang diharapkan Al-Qur'an,²¹ maka ia (manusia) perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW. menegaskan dalam haditsnya yang sangat populer, bahwa mencari ilmu adalah *wajib* atas setiap Muslim dan Muslimah. Selanjutnya, ditemukan juga sebuah hadits beliau yang maksudnya: "Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu, maka ia (diancam) akan dipasangi mulutnya dengan kendali yang terbuat dari api." Dan masih banyak lagi ayat Al-Qur'an maupun teks hadits yang berbicara tentang ilmu dan pendidikan. Intinya adalah Islam **memerintahkan** agar setiap Muslim mencari ilmu (belajar), menguasainya dan menyebarkanluaskannya (semakna dengan demokratisasi) atas dasar ibadah,²² dan sekaligus menebarkan rahmat²³ – dalam hal ini berupa pemberian kesempatan belajar - sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. dalam Al-Qur'an.

Dalam uraian-uraian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa Islam memerintahkan - bukan hanya menganjurkan – umatnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas-diri dengan berbekal ilmu pengetahuan, dan memberikan ancaman atas orang-orang yang tidak mau menyebarkanluaskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka pemahaman tersebut sejalan dengan ruh dari makna demokratisasi pendidikan.

Berikut ini adalah uraian mengenai pandangan historis. Yang dimaksudkan di sini ialah memaparkan fakta-fakta kesejarahan yang membuktikan eratny keterkaitan Islam dengan demokratisasi/pendemokrasian pendidikan.

Setelah menelaah beberapa literatur, ditemukan banyak fakta kesejarahan yang membuktikan kuatnya komitmen (umat) Islam terdapat penyelenggaraan

Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan | Noor Rohman | <

Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014 | 63

pendidikan secara terbuka, tanpa adanya diskriminasi. Sehubungan dengan ini Prof. Dr. Hasan Langgulung berkomentar :

"Sebenarnya faktor utama dari perkembangan dan tersiamya kebudayaan Islam di antara bangsa-bangsa yang beragama lain adalah karena Islam adalah agama pertama kali mengakui bahwa setiap manusia berhak, malah diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajari kemahiran-kemahiran menurut kesukaan dan kecenderungannya. Sejarah peradaban-peradaban lain dari dulu sampai sekarang telah menunjukkan bahwa hak memperoleh ilmu pengetahuan adalah merupakan hak-hak golongan-golongan istimewa, kebanyakann a pendeta-pendeta, penguasa

Pada awal sejarah Islam, Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya tanpa pilih-pilih. Beliau tanamkan rasa kebersamaan di antara mereka. Beliau mengajarkan bahwasannya tiada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan ketaqwaannya. Beliau kembangkan tradisi pendidikan dengan semangat yang sangat tinggi, sehingga menjadikan masjid tidak hanya untuk melakukan sholat, tetapi masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar bagi semua lapisan masyarakat Muslim Madinah.²⁵ Pada abad-abad pertengahan banyak orang Kristen yang belajar di Universitas Cordoba, kemudian mereka membawa pulang ilmu dan kebudayaan ke negeri-negeri asal mereka. Di antara mereka adalah Gerbert, yang kemudian hari menjadi Paus Sylvester II, yang telah banyak memperkenalkan ilmu pasti kepada Eropa.²⁶ Dan pada masa yang sama di Baghdad mahasiswa-mahasiswa belajar di Universitas Mustanshiriyah dengan gratis, dan Maha-gurunya digaji menurut banyaknya mahasiswa. Di Universitas ini terdapat sebuah dapur umum yang menyajikan makanan-makanan yang lezat (roti dan daging). Di samping itu terdapat pula perpustakaan besar, klinik dan kolam renang.²⁷

Dalam konteks Indonesia, kita dapat menyaksikan ribuan pondok pesantren yang berkembang demikian pesatnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dinamika dan perkembangannya berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini. Terlepas daripada plus-minus yang terdapat pada pondok pesantren, secara sosio-historis yang perlu dicatat dari keberadaannya adalah **'kemerakyatannya'**, sehingga menurut Nurcholis Madjid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*).²⁸ Hal ini dapat dilihat dari budaya yang dikembangkannya, antara lain yaitu ketaatan murid kepada guru (kyai), rasa persamaan, persaudaraan dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

> | Noor Rohman Fauzan | Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan

64 | Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014

Pesantren-pesantren yang ada hampir dapat dikatakan semuanya didirikan atas inisiatif para kyai secara pribadi dan dukungan masyarakat sekitanya. Mendirikan pesantren bagi para kyai adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah Allah (ibadah) yang berkenaan dengan upaya mendidik dan mencerdaskan umatnya (*nasyrul 'ilmi wa tahdzibul-Ummah/menyebarkan ilmu dan mendidik umat*).

Dari uraian-uraian tersebut dapat diambil pemahaman, bahwa demokratisasi pendidikan menurut Islam adalah suatu perkara yang sifatnya imperatif (perintah). Demikian ini secara jelas dapat dilihat dari sisi teologis dan dibuktikan – sepanjang sejarah perkembangan Islam – oleh Nabi, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga sekarang ini.

Dari semua uraian yang telah disampaikan di muka, maka dapatlah dirumuskan butir-butir simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa demokratisasi pendidikan adalah satu ide atau gagasan konseptual penting yang berkenaan dengan usaha terpuji dalam rangka memberi kesempatan kepada setiap individu/warga negara untuk menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.
2. Bahwa meskipun di Indonesia demokratisasi pendidikan mempunyai landasan konstitusional (pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945), namun pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, dikarenakan masih banyak kebocoran pada anggaran peruntukannya dan lemahnya sistem penanganannya, sehingga banyak anak usia sekolah yang tak dapat bersekolah dikarenakan adanya pungutan-pungutan uang di luar ketentuan.
3. Bahwa Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama pungkasan yang berisi petunjuk-petunjuk hidup yang lengkap – dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber utamanya yang meliputi berbagai aspek termasuk pendidikan, baik secara teoritis, metodik maupun praktikal di mana Nabi dan para sahabatnya serta para pengikutnya telah melakukan peran-perannya di dalam sejarah pendidikan umat Islam sehingga menjadi tradisi yang turun-temurun (estafet).

-
4. Bahwa melalui optimalisasi pengaktualisasian tradisi tersebut, maka pada abad pertengahan (umat) Islam telah mencapai puncaknya selama beberapa abad (*the Golden Ages*). Dan dari rahimnya dilahirkan ilmuwan-ilmuwan besar

Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan | Noor Rohman | <

Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014 | 65

Muslim, seperti Ibnu Sienan (Avicenna). Ibnu Rusyd (Averroes) dan lain-lainnya yang akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan bangsa Eropa untuk bangkit dari kegelapannya (*Renaissance*).

5. Bahwa Islam dengan jelas memandang demokratisasi pendidikan sebagai sesuatu yang imperatif. Mengingat Islam adalah agama yang pertama kali mengakui bahwa setiap manusia berhak, malah diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajari kemahiran-kemahiran menurut kesukaan dan kecenderungannya, dan Islam mencela bahkan mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan (Hadits Nabi).

Demikian butir-butir penting yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini, dan akhirnya diharapkan adanya kritik dan masukan. Semoga bermanfaat. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariem

Ahmad Amin, *Fajrul al-Islam*, Kairo: al-Nahdhah, 1975.

Ahmad Sa'd Mursiy, *Tathawwur al-Fikr Al-Tarbawiy (Perkembangan Pemikiran*

- Pendidikan*), Kairo: 'Alam al-Kutub, 1975.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Kairo : Al-Nahdhah Al-Mishriyah, 1964.
- Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1985.
- Hoesin Umar Amin, *Kultur Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- John Dewey, *Democracy and Education, in Introduction to the Philosophy of Education*, New York : The Macmillan Company, 1964.
- Muin Umar, A., *Islam di Spanyol*, Yogyakarta : Lembaga Penerbitan IAIN Yogyakarta, 1975.
- National Commission for UNESCO, *Egypt, Islamic and Arab Contribution to the European Renaissance. (Terj. Ahmad Tafsir dengan judul "Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan)*. Bandung : Pustaka, 1986.
- Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, suatu teori pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987.
-

> | Noor Rohman Fauzan | Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan

66 | Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014

- Nurchois Madjid, *Bilik-bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta Paramadina, 1997.
- , *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Poeradisastra, S.I., *Sumbangan Islam kepada Ilmu & Peradaban Modern*, Jakarta : P3M, 1986.
- Russel, Bertrand, *History of Western Philosophy*, London : George Allen & Unwin Ltd., 1974.
- Soerdijarto, *Pendidikan Nasional sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*, Jakarta : CINAPS, 2000.
- , *Pendidikan Nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3S, 1974.
- The New International Webster's Dictionary of the English Language*, China : Trident Press International, 1997.
- Zaid Ibn 'Abd al-Aziz Ibn Fayed, *Al-Din wa al-Ilmu*, Beirut: Dar al-Andalus, 1970.

ENDNOTE

¹Lihat *The New International Webster's Dictionary of the English Language*, China : Trident Press International, 1997, h. 127.

² Lihat Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003, h. 168.

Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa, Jakarta : CINAPS, 2000.

³ *The New International Webster's Dictionary of the English Language* : foe.cit.

⁴ Soedijarto, foe.cit.

⁵ Baca Nurchois Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997, h. 214.

⁶ Disebutkan dalam pasal 3 UUD 1945, bahwa : "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional." (Dikutip dari Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*, Jakarta : CINAPS, 2000, h. 36)

⁷ Hendaknya dikaitkan dengan rumusan tiga fungsi pendidikan dari Noeng Muhajir, (1) menumbuhkan kreativitas subyek-didik; (2) menjaga lestariannya nilai-nilai insani dan nilai-nilai Ilahi, dan (3)

Perspektif Islam Tentang Demokratisasi Pendidikan | Noor Rohman | <

Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014 | 67

menyiapkan tenaga kerja produktif, dalam bukunya, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1987, h. 26.

⁸ John Dewey, *Democracy and Education, in Introduction to the Philosophy of Education*, New York : The Macmillan Company, 1964, h. 87.

⁹ Dikutip dari Soedijarto, *op.cit.*, h. 171.

¹⁰ Baca Q.5. al-Isra'/17:9.

¹¹ Nabi menjadikan rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam, yang terletak di alas bukit al-Shafa, sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar pertama, di mana beliau lakukan hal itu secara diam-diam karena kondisi masyarakat Makkah masih dalam 'kegelapan' (Baca Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Kairo : Al-Nahdhah Al-Mishriyah, 1964, Juz I, h. 80)

¹² Baca Ahmad Amin, *Fajrul al-Islam*, Kairo: al-Nahdhah, 1975, h. 142.

¹³ Baca Zaid Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Fayed, *Al-Din wa al-'Ilm*, Beirut: Dar al-Andalus, 1970, hh. 13-14.

¹⁴ Baca Ahmad Sa'd Mursiy, *Tathawwur al-Fikr Al-Tarbawiy (Pembangunan Pemikiran Pendidikan)*, Kairo: 'Alam al-Kutub, 1975, h. 182.

¹⁵ Bandingkan dengan Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1101 M., Universitas Oxford pada tahun 1167 M., dan Universitas Cambridge pada tahun 1171 M. (Baca Hoesin, Umar Amin, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h.10).

¹⁶ Baca Muin Umar, A., *Islam di Spanyol*, Yogyakarta : Lembaga Penerbitan IAIN Yogyakarta, 1975, hh.26-27.

¹⁷ Baca National Commission for UNESCO, *Egypt, Islamic and Arab Contribution to the European Renaissance*. (rerj. Ahmad Tafsir dengan judul "*Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*). Bandung : Pustaka, 1986, hh.170-171; Baca juga Poeradisastra, 5.1., *Sumbangan Islam kepada Ilmu & Peradaban Modern*, Jakarta: P3M, 1986.

¹⁸ Russel, Bertrand, *History of Western Philosophy*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1974, h. 288.

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah/2 : 185

²⁰ Q.S. Adz-Dzariyat/51: 56

²¹ Al-Qur'an mengatakan: "Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah diantara kamu yang paling berkualitas amal perbuatannya?" (Q.5. Al-Mulk/67:2)

²² Bandingkan dengan Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000, h. 10.

²³ "Dan tidaklah Kami mengutuskanmu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Al-Anbiya'/21: 107).

²⁴ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985, h. 10.

²⁵ Baca Azyumardi Azra, *op.cit.*, h. 56.

²⁶ Baca Poeradisastra, 5.1., *op.cit.*, h.20

²⁷ Baca Hoesin, Umar Amin, *op.cit.*, h. 24-25

²⁸ Nurchois Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997, h.3.

²⁹ Baca Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta : LP35, 1974, h. 19-20.
